

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan pada bagian bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, secara teoritis hubungan kerjasama DIY dengan provinsi diluar negeri dalam perspekif otonomi daerah di indonesia adalah penting untuk kemajuan daerah dalam melakukan hubungan luar negeri. Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah di indonesia telah memberikan konstribusi bagi DIY dalam melaksakan kerjasama luar negeri, pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia memberikan dampak positif bagi tingkat pertumbuhan perekonomian di Yogyakarta. Walaupun undang-undang otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan kerja sama luar negeri, akan tetapi daerah berpedoman pada aturan yang mengatur tentang hubungan luar negeri, peran atau fungsi paradiplomasi, sehingga Pemda dapat dengan leluasa menjalankan peran diplomasinya pada bidang-bidang yang telah ditetapkan secara yuridis, tanpa melangkahi kewenangan pemerintah pusat dalam hal kerja sama internasional.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan hubungan luar negeri mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi kepada daerah untuk menentukan nasibnya sendiri, memberikan keleluasaan bagi daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Maka Pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan leluasa melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Paradiplomasi masih merupakan praktek berpemerintahan yang baru, sehingga memerlukan perangkat aturan yang jelas di tengah pelaksanaan pemberlakuan

pemerintahan desentralisasi ini. Sehingga peluang kerjasama luar negeri oleh daerah kabupaten, kota dan provinsi menjadi kajian yang menarik bagi studi hubungan internasional. karena berhubungan dengan munculnya aktor-aktor baru dalam kancah internasional. Kajian yang lebih populer disebut sebagai paradiplomasi ini memungkinkan para pengambil keputusan di pemerintah daerah untuk berkolaborasi atau bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM dan penyiapan kajian strategis terkait rencana kerjasama daerah dengan negara-negara lain.